



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**  
**DIREKTORAT INVENTARISASI GRK DAN MPV**

Alamat: Gedung Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6. Wing A  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta Pusat 10270  
Telp. : +62 21 5730822 Fax. : +62 21 5730242

Website: <http://ditjenppi.menlhk.go.id>

Email: [tu.igrkmpv@gmail.com](mailto:tu.igrkmpv@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
Individual Consultant/Perusahaan Jasa

Sub Kegiatan:

Dukungan Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) Menu  
Proposal Pendanaan SRN

---

<b>Project</b>	: <i>Result Based Payment Programme Forest Carbon Facility (RBP FCPF) Carbon Fund</i> Tingkat Nasional
<b>K/L</b>	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
<b>Eselon I</b>	: Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
<b>Pelaksana</b>	: Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK MPV)
<b>Tahun</b>	: AWP Tahun 1 (2024)

---

## LATAR BELAKANG

Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund adalah sebuah platform global yang dikelola oleh World Bank, yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat guna mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, FCPF Carbon Fund juga berfokus pada tata kelola kawasan berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan, atau yang dikenal sebagai program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+).

Dari Program ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendapatkan *Result Based Payment (RBP)* untuk pengurangan emisi GRK sebesar 22 juta Ton CO<sub>2</sub>e, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi pada periode monitoring 2019-2021.

RBP dalam bentuk Advance Payment Program FCPF-Carbon Fund ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai penyelenggara. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, BPD LH telah menunjuk Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara (lamtera) yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ini kepada penerima manfaat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui beberapa unit.

Salah satu unit penerima manfaat yaitu Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK MRV) yang akan berfokus pada: Pemantauan & Pengawasan input SRN PPI, Pemantauan & Pengawasan input SIGNSMART, Pemantauan & Pengawasan MRV (Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi), dan GHGI (Inventarisasi Gas Rumah Kaca), Peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kapasitas SDM tentang MRV dan GHGI.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan, Direktorat IGRK MPV membutuhkan Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) dalam Tracking Progress NDC. Konsultan/Perusahaan Jasa ini akan fokus pada proses pengembangan sistem SRN PPI. Konsultan/Perusahaan Jasa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam implementasi Program FCPF Carbon Fund oleh Direktorat IGRK MPV.

## **TUJUAN PENUGASAN**

Program FCPF Carbon Fund mencari Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dalam Tracking Progress NDC untuk mendukung implementasi tugas dan fungsi Direktorat IGRK MPV, terutama dalam menguatkan SRN dalam melakukan tracking progress pencapaian target NDC. Sistem SRN PPI merupakan sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

## **LINGKUP KERJA**

Berkolaborasi dengan staf Direktorat IGRK MPV dan tenaga ahli lainnya, Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) dalam Tracking Progress NDC akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas utama yang dijelaskan di bawah ini:

1. Melakukan identifikasi teknis dalam pengembangan SRN PPI yang berhubungan dengan *existing condition*;
2. Membangun ruang baru (menu baru) dalam sistem SRN, meliputi menu proposal pendanaan SRN;
3. Melakukan koordinasi internal pengenalan pembaharuan sistem SRN PPI pada tim Direktorat IGRK MRV;
4. Melakukan *trial and error* pada proses implementasi pembaharuan pada sistem SRN PPI
5. Secara aktif terlibat dalam proses diskusi pengembangan sistem termasuk memberikan gambaran risiko pada proses pengembangannya secara teknis.

## **LUARAN**

1. Menu baru dalam sistem SRN, menu menu proposal pendanaan SRN yang dapat digunakan dengan baik tanpa error.

## **JADWAL KERJA**

Durasi kerja Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) dalam Tracking Progress NDC selama 2 bulan Mei - Juni 2024. Konsultan/Perusahaan Jasa ini memiliki fleksibilitas untuk bekerja secara mobile dari wilayah Jakarta, dan siap untuk sewaktu-waktu berkoordinasi langsung dengan tim Direktorat IGRK MRV, di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6, Jakarta Pusat.

## **KRITERIA KONSULTAN/PERUSAHAAN JASA PENGEMBANGAN MENU SRN**

1. Individu/Perusahaan Jasa yang memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan IT/Informasi Technology lebih dari 2 tahun;
2. Memahami pembuatan dan/atau pembaharuan pada sistem berbasis web termasuk *coding* dan lainnya;
3. Familiar dengan sistem SRN menjadi nilai tambah;
4. Familiar dengan risiko pengembangan sistem berbasis web.

## **PROSES PEREKRUTAN**

Proses rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan April 2024 dan calon Konsultan/Perusahaan Jasa - Penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) dalam Tracking Progress NDC ini akan diseleksi oleh Direktorat IGRK MPV dan Yayasan Penabulu melalui mekanisme Seleksi Kompetitif Terbuka Konsultan Perorangan maupun Perusahaan Jasa.

## **SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan pekerjaan akan dibiayai oleh dana RBP - FCPF tingkat nasional.



Jakarta, 23 April 2024

Budiharto, S.Si., M.Si.

NIP. 19671022 199803 1 002